**ABSTRAK**

Sistem pengendalian intern merupakan salah satu kriteria bagi BPK selaku auditor eksternal dalam hal menilai laporan keuangan pemerintah daerah. Berkualitas tidakanya suatu laporan keungan pemerintah daerah juga ditentukan dengan seberapa memadainya sistem pengendalian intern yang diterapkan ini juga berpengaruh terhadap opini badan pemeriksa keuangan berdasarkan temuan untuk selanjutnya BPK Memberi rekomendasi atas temuan sistem pengendalian intern tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Umum Temuan BPK-RI Terhadap Sistem Pengendalian Intern Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah** (Studi Kasus Entitas Pelaporan Se-Provinsi Sulawesi Tenggara)”

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana penulis menggunakan data temuan sistem pengendalian intern pemerintah daerah Se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya di kelompokan bedasarkan permasalahan kemudian dianalisis bersama dengan rekomendasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis.

Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer (data yang diperoleh dari hasil wawancara) dan data sekunder (data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Ihtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) , Pedoman Manajemen pemeriksaan (PMP) , Standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) , dll.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa jumlah temuan sistem pengendalian intern terhadap opini yang di berikan oleh BPK tidak begitu berpengaruh ini didasarkan pada pemberian opini BPK yang berlaku linear atas kewajaran terhadap temuan sistem pengendalian intern pemerintah daerah dengan mengacu pada standar pemeriksaan dan dampak kerugian materil yang ditimbulkan oleh masalah sistem pengendalian intern yang dijadikan temuan oleh badan pemeriksa keuangan untuk selanjutnya diberikan rekomendasi kepada kepala derah sebagai perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh seluruh elemen entitas pelaporan yang bersangkutan.

Kata kunci: opini, temuan, rekomendasi, sistem pengendalian intern, tindak lanjut.

***ABSTRACT***

*Internal Controlling system is one of the criteria for BPK as an external auditor in terms of assessing local government financial statements. The quality of the government financial report is determined by how adequate the internal controlling system that is applied that also effect towards BPK opinion based temuan BPK grants recommendation on the temuan internal controlling system therefore the author interested in conducting a study titled “BPK-RI Temuan General Review Towards The Internal Control System in Regional Government Financial Statements (Study Case: Reporting Entity Southeast Sulawesi Province) "*

*The method applied is descriptive qualitative, where the author applies the temuan data of internal controlling system of local government in Southeast Sulawesi Province which then is grouped based on context then analyzed together with the recommendations and interviews that have been done by the author.*

*The data types used are primary data (data generated from the interview) and secondary data (Inspection Result Data (LHP), I Valuation Examination Result (IHPS), Management Check Guidelines (PMP), State finance audit standards (SPKN) etc.*

*Based on the results of the analysis conducted it can be concluded that the number of temuan internal controlling system towards the BPK opinion does not really effect it is based on the grant of opinion by BPK that applies linearly upon the fairness of the temuan local government internal controlling system by referring to the inspection standards and material loss impact that is inflicted by internal controlling system problems that is made into temuan by BPK that is further given local government recommendation as an improvement to be followed up by all elements of the relevant reporting entity.*

*Keywords: opinion, findings, recommendations, internal control system, follow up.*